BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPMPTSP

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Kondusif tidaknya iklim berinvestasi di suatu daerah dipengaruhi beberapa faktor. Beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi iklim usaha adalah keamanan dan ketertiban; kemudahan Perizinan; peraturan daerah yang mendukung iklim usaha; serta pengenaan pajak daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat diantaranya adalah pelaksanaan Program Pengembangan Kebijakan Investasi Daerah melalui Kegiatan Sosialisasi Perizinan dan Program Pengembangan Pembangunan secara terpadu. Dalam kaitan ini, diterapkan pelayanan Perizinan terpadu. Artinya Pemerintah Kabupaten dapat memberikan pelayanan Perizinan usaha dan penanaman modal secara cepat murah dan mudah dalam satu tempat pelayanan secara terpadu.

Pertumbuhan investasi di Kabupaten Lamandau sampai dengan awal tahun 2013 masih terasa lamban dimana baru tercatat 5 Perusahaan PMA dengan total investasi mencapai Rp. 650.719.519.193,- dan 10 Perusahaan PMDN dengan total investasi mencapai Rp. 1.414.395.884.559,-. Pada periode Renstra 2013-2018 sampai dengan Desember 2017 nilai investasi tercatat sebesar Rp. 8.938.890.672.811,- yang terdiri atas Rp 1.564.530.989.112,- dari PMA dan Rp. 7.374.359.683.699,- yang berasal dari PMDN. Lambatnya pertumbuhan investasi disebabkan potensi sumberdaya yang diusahakan investor sebagian besar bertumpu pada sektor perkebunan besar kelapa sawit. Bidang pertambangan dan kehutanan belum dikelola secara optimal. Sedangkan sektor unggulan yang dikelola oleh masyarakat juga hanya bertumpu pada kebun kelapa sawit yang dikelola

3.1.1 Hasil-hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya

Seperti telah disebutkan sebelumnya, KPPT baru ditingkat statusnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sejak awal tahun 2013. Dan pada bulan Desember 2016 berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian pembahasan pada sub bab ini menggambarkan kinerja yang dicapai oleh DPMPTSP. Beberapa butir pencapaian DPMPTSP dapat diringkas sebagai berikut:

1. SDM Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya, namun telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan.
2. Jumlah Perizinan yang diterbitkan pada tahun 2013 dan 2017 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Jumlah Perizinan yang Diterbitkan

No.	Jenis Ijin	Terbit 2013	Terbit 2017
1.	IMB	68	98
2.	SIUJK	42	27
3.	IJIN TRAYEK	0	-
4.	SITU & SIDOM	272	194&220=414
5.	SIUP	77	173
6.	TDP	143	151
7.	SPP	-	322
8.	REKLAME	263	266
9.	IJIN GANGGUAN (HO)	143	-
10.	IJIN ANGKUTAN	-	-
11.	TANDA DAFTAR GUDANG		-
12.	IZIN PENYELENGGARAAN APOTIK		-
13.	IZIN PRAKTEK APOTEKER		7
14.	IZIN PRAKTEK BIDAN		11
15.	IZIN KERJA PERAWAT		-
16.	IZIN KERJA BIDAN		-

17.	IZIN PRAKTEK PERAWAT		92
18.	IZIN PRAKTEK DOKTER		8
19.	IZIN LOKASI		16
20.	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL		2
Jumlah		1108	1587

Sumber: LAKIP BPPTPM 2013 dan DPMPTSP 2017

3. Pendapatan retribusi DPMPTSP juga menunjukkan bahwa realisasinya dapat melampaui jumlah yang ditargetkan. Retribusi izin HO tidak terealisasi karena Izin HO sudah ditiadakan. Lihat Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Pendapatan Retribusi DPMPTSP

No	Jenis Pendapatan Asli Daerah	Target 2013 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	(%)	Target 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	(%)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Rumah dinas)				150.000	900.000	600
2.	Retribusi IMB	217.970.000	197.962.500	110	125.000.000	206.352.451	165,23
3.	Retribusi Izin Trayek	10.000.000	-		-	-	-
4.	Retribusi Izin Gangguan / HO	454.250.740	494.596.065	108	14.334.795	-	-
5.	Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah (Rumah dinas)				-	-	-
6.	Denda Retribusi IMB				-	-	-
7.	Denda Retribusi Izin Gangguan / HO				-	-	-
Jumlah		682.220.740	692.558.565	101	139.484.795	207.432.451	148,72

Sumber: LAKIP BPPTPM 2013 dan DPMPTSP 2017

4. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik Pemerintah Lamandau pada tahun 2016 menunjukkan hasil rata-rata nilai indeks 78,22 dari target 78 atau termasuk dalam kategori " BAIK ". Nilai rata-rata indeks tersebut didasarkan pada pengukuran pelayanan perizinan. Dengan demikian, capaian nilai indeks rata-rata sudah cukup optimal karena telah mencapai target. Walaupun demikian pelayanan publik yang sudah baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

5. Kewenangan Perizinan

Sampai dengan Desember 2018 DPMPTSP telah melayani 35 jenis Perizinan dari 169 Jenis Izin yang dilimpahkan kewenangannya.

Tabel 3.3 Kewenangan Perizinan s/d Desember 2018

No.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		YANG MENANDATANGANI
1	2	3		4
			PERIZINAN	
I	Penanaman Modal	1	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Usaha (Perluasan, Perubahan dan Penggabungan) Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	Kepala DPMPTSP
			PERIZINAN	

I	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Kepala DPMPTSP
		2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Kepala DPMPTSP
		3	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Konferensi dan Pameran	Kepala DPMPTSP
		4	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri	Kepala DPMPTSP
		6	Tanda Daftar Industri (TDI)	Kepala DPMPTSP
		7	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Usaha Simpan Pinjam	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Simpan Pinjam	Kepala DPMPTSP
		10	Izin Pemakaian Kios/Lapak	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Penyimpanan Bahan Bakar untuk Industri	Kepala DPMPTSP
		12	Izin Penjualan Minuman beralkohol/Miras	Kepala DPMPTSP
		13	Izin Pengilingan Padi	Kepala DPMPTSP
		14	Izin Distributor Pupuk Bersubsidi	Kepala DPMPTSP
		15	Izin Pasar	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Penjualan Minuman beralkohol/Miras	Bupati Lamandau
		1	Rekomendasi Penjualan Minuman beralkohol/Miras	Kepala Diskoperindag
		2	Rekomendasi Izin Pengilingan Padi	Kepala Diskoperindag
		3	Rekomendasi Izin Distributor Pupuk Bersubsidi	Kepala Diskoperindag
		4	Rekomendasi Izin Pasar	Kepala Diskoperindag
		5	Rekomendasi Surat Ketetapan Pedagang Pasar	Kepala Diskoperindag
		6	Rekomendasi Izin Barak/ Rumah Sewa	Kepala Diskoperindag
			PERIZINAN	
II	Kesehatan	1	Izin Apotik	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Toko Obat	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Penyelenggaraan Optikal	Kepala DPMPTSP

		4	Izin Toko Obat Tradisional	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Praktik Dokter	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Praktik Bidan	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Kerja Perawat	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Praktik Perawat	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Klinik Bersalin Pratama	Kepala DPMPTSP
		10	Izin Klinik Pratama	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama	Kepala DPMPTSP
		12	Izin Klinik Bersalin Utama	Kepala DPMPTSP
		13	Izin Klinik Utama	Kepala DPMPTSP
		14	Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama	Kepala DPMPTSP
		15	Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Tipe Umum Tipe C dan D	Kepala DPMPTSP
		16	Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Tipe C	Kepala DPMPTSP
		17	Izin Laboratorium Swasta	Kepala DPMPTSP
		18	Izin Penyelenggaraan Spa	Kepala DPMPTSP
		19	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	Kepala DPMPTSP
		20	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Kepala DPMPTSP
		21	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnosnik	Kepala DPMPTSP
		22	Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Fisioterafis	Kepala DPMPTSP
		23	Izin Toko Alat Kesehatan	Kepala DPMPTSP
		24	Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)	Kepala DPMPTSP
		25	Izin Praktik Dokter Gigi	Kepala DPMPTSP
		26	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	Kepala DPMPTSP
		27	Izin Praktik Dokter Spesialis	Kepala DPMPTSP
		28	Izin Kerja Perawat Gigi	Kepala DPMPTSP
		29	Izin Praktik Apoteker	Kepala DPMPTSP
		30	Izin Kerja Apoteker	Kepala DPMPTSP
		31	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Kepala DPMPTSP
		32	Izin Praktik Fisioterafis	Kepala DPMPTSP
		33	Izin Praktik Okupasi terafis	Kepala DPMPTSP
		34	Izin Praktik Terafis Wicara	Kepala DPMPTSP
		35	Izin Kerja Refraksionis Optisien	Kepala DPMPTSP

			(RO)	
		36	Izin Kerja Radiografer	Kepala DPMPTSP
		37	Izin Bagi Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif	Kepala DPMPTSP
		38	Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	Kepala Dinkes
		1	Rekomendasi Izin Apotik	Kepala Dinkes
		2	Rekomendasi Izin Toko Obat	Kepala Dinkes
		3	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Optik	Kepala Dinkes
		4	Rekomendasi Izin Toko Obat Tradisional	Kepala Dinkes
		5	Rekomendasi Izin Praktik Dokter	Kepala Dinkes
		6	Rekomendasi Izin Praktik Bidan	Kepala Dinkes
		7	Rekomendasi Izin Kerja Perawat	Kepala Dinkes
		8	Rekomendasi Izin Praktik Perawat	Kepala Dinkes
		9	Rekomendasi Izin Klinik Bersalin Pratama	Kepala Dinkes
		10	Rekomendasi Izin Klinik Pratama	Kepala Dinkes
		11	Rekomendasi Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama	Kepala Dinkes
		12	Rekomendasi Izin Klinik Bersalin Utama	Kepala Dinkes
		13	Rekomendasi Izin Klinik Utama	Kepala Dinkes
		14	Rekomendasi Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama	Kepala Dinkes
		15	Rekomendasi Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Tipe Umum Tipe C dan D	Kepala Dinkes
		16	Rekomendasi Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Tipe C	Kepala Dinkes
		17	Rekomendasi Izin Laboratorium Swasta	Kepala Dinkes
		18	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Spa	Kepala Dinkes
		19	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	Kepala Dinkes
		20	Rekomendasi Izin	Kepala Dinkes

			Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
		21	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnosnik	Kepala Dinkes
		22	Rekomendasi Izin Toko Alat Kesehatan	Kepala Dinkes
		23	Rekomendasi Izin Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)	Kepala Dinkes
		24	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Gigi	Kepala Dinkes
		25	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	Kepala Dinkes
		26	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Spesialis	Kepala Dinkes
		27	Rekomendasi Izin Kerja Perawat Gigi	Kepala Dinkes
		28	Rekomendasi Izin Praktik Apoteker	Kepala Dinkes
		29	Rekomendasi Izin Kerja Apoteker	Kepala Dinkes
		30	Rekomendasi Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Kepala Dinkes
		31	Rekomendasi Izin Praktik Fisioterafis	Kepala Dinkes
		32	Rekomendasi Izin Praktik Okupasi terapis	Kepala Dinkes
		33	Rekomendasi Izin Praktik Terafis Wicara	Kepala Dinkes
		34	Rekomendasi Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO)	Kepala Dinkes
		35	Rekomendasi Izin Kerja Radiografer	Kepala Dinkes
		36	Rekomendasi Izin Bagi Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif	Kepala Dinkes
		37	Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat	Kepala Dinkes
			PERIZINAN	
III	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Izin Usaha Angkutan Bermotor	Kepala DPMPPTSP
		2	Izin Angkutan Barang Khusus	Kepala DPMPPTSP
		3	Izin Trayek Darat/ Sungai/ Baru	Kepala DPMPPTSP

			dan Perpanjangan	
		4	Izin Trayek Angkutan Pedesaan	Kepala DPMPTSP
		5	Kartu Pengawas (KP) Angkutan Pedesaan	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Isidentil Angkutan Pedesaan / Angkot	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Sertifikasi dan Past Kapal	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Penyelenggaraan Pos	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Pendirian Jasa Titipan <u>ntuk Kantor Agen</u>	Kepala DPMPTSP
		10	Izin Warung Telekomunikasi (Wartel)	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	Kepala DPMPTSP
		12	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Kepala DPMPTSP
		13	Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
		14	Izin Penggalian Kabel Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
		15	Izin Instalasi Genset Menara Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
		16	Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
		17	Izin TV Kabel	Kepala DPMPTSP
		18	Izin Warung Internet (Warnet)	Kepala DPMPTSP
		19	Izin Pendirian Menara Telekomunikasi	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Bermotor	Kepala Dishub
		2	Rekomendasi Izin Angkutan Barang Khusus	Kepala Dishub
		3	Rekomendasi Izin Trayek Darat/ Sungai/ Baru dan Perpanjangan	Kepala Dishub
		4	Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Pedesaan	Kepala Dishub
		5	Rekomendasi Kartu Pengawas (KP) Angkutan Pedesaan	Kepala Dishub
		6	Rekomendasi Izin Isidentil Angkutan Pedesaan / Angkot	Kepala Dishub
		7	Rekomendasi Izin Sertifikasi dan Past Kapal	Kepala Dishub
		8	Rekomendasi Izin	Kepala Dishubkomimfo

			Penyelenggaraan Pos	
		9	Rekomendasi Izin Pendirian Jasa Titipan <u>ntuk Kantor Agen</u>	Kepala Dishubkomimfo
		10	Rekomendasi Izin Warung Telekomunikasi (Wartel)	Kepala Dishubkomimfo
		11	Rekomendasi Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G)	Kepala Dishubkomimfo
		12	Rekomendasi Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Kepala Dishubkomimfo
		13	Rekomendasi Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
		14	Rekomendasi Izin Penggalian Kabel Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
		15	Rekomendasi Izin Instalasi Genset Menara Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
		16	Rekomendasi Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
		17	Rekomendasi Izin TV Kabel	Kepala Dishubkomimfo
		18	Rekomendasi Izin Warung Internet (Warnet)	Kepala Dishubkomimfo
		19	Rekomendasi Izin Pendirian Menara Telekomunikasi	Kepala Dishubkomimfo
			PERIZINAN	
IV	Sosial Dan Ketenaga Kerjaan	1	Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial dengan Cara Mencetak dan menjual Karcis	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial Dengan Cara Mencetak dan Menjual Karcis	Kepala Dinsos
		2	Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja	Kepala Disnakertrans
		3	Rekomendasi Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Kepala Disnakertrans

			PERIZINAN	
V	Keparawisataan	1	Tanda Daftar Usaha Hotel Berbintang	Kepala DPMPTSP
		2	Tanda Daftar Usaha Restoran, RumahMakan, tempatmakandanjasaboga	Kepala DPMPTSP
		3	Tanda Daftar Usaha Permainanketangkasanelektronik termasuk bingo dansejenisnya	Kepala DPMPTSP
		4	Tanda Daftar Usaha Biro perjalanan danagenperjalananwisata.	Kepala DPMPTSP
		5	Tanda Daftar Usaha RuangSerbaGuna	Kepala DPMPTSP
		6	Tanda Daftar Usaha Karaoke VIP Room / Non VIP Room.	Kepala DPMPTSP
		7	Tanda Daftar Usaha Taman Rekreasi	Kepala DPMPTSP
		8	Tanda Daftar Usaha KolamPemancingan	Kepala DPMPTSP
		9	Tanda Daftar Usaha PameranSeni / PasarSeni / Galeri	Kepala DPMPTSP
		10	Tanda Daftar Usaha TempatBilyard	Kepala DPMPTSP
		11	Tanda Daftar Usaha Persewaan Audio Visual, VCD dansejenis Play Station.	Kepala DPMPTSP
		12	Tanda Daftar Usaha Perizinan Pramuwisata.	Kepala DPMPTSP
		13	Tanda Daftar Usaha Musik hidupdanpanggunghiburan (terbuka, tertutup)	Kepala DPMPTSP
		14	Tanda Daftar Usaha Pertunjukan Film.	Kepala DPMPTSP
		15	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	Kepala DPMPTSP
		16	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Kepala DPMPTSP
		17	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	Kepala DPMPTSP
		18	Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minum	Kepala DPMPTSP
		19	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata	Kepala DPMPTSP
		20	Tanda Daftar Usaha Jasa	Kepala DPMPTSP

			Pramuwisata	
		21	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	Kepala DPMPTSP
		22	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	Kepala DPMPTSP
		23	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	Kepala DPMPTSP
		24	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Kepala DPMPTSP
		25	Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Kepala DPMPTSP
		26	Tanda Daftar Usaha Spa	Kepala DPMPTSP
		27	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	Kepala DPMPTSP
		28	Tanda Daftar Sanggar Senam	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Hotel Berbintang	Kepala Dispar
		2	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Restoran, RumahMakan, tempatmakandanjasaboga	Kepala Dispar
		3	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Permainanketangkaselektronik termasuk bingo dansejenisnya	Kepala Dispar
		4	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Biro perjalanandanagenperjalananwisata.	Kepala Dispar
		5	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha RuangSerbaGuna	Kepala Dispar
		6	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Karaoke VIP Room / Non VIP Room.	Kepala Dispar
		7	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Taman Rekreasi	Kepala Dispar
		8	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha KolamPemancingan	Kepala Dispar
		9	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha PameranSeni / PasarSeni / Galeri	Kepala Dispar
		10	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha TempatBilyard	Kepala Dispar
		11	Rekomendasi Tanda Daftar	Kepala Dispar

			Usaha Persewaan Audio Visual, VCD dan sejenis Play Station.	
		12	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Perizinan Pramuwisata.	Kepala Dispar
		13	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Musik hidup dan panggung hiburan (terbuka, tertutup)	Kepala Dispar
		14	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pertunjukan Film.	Kepala Dispar
		15	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata	Kepala Dispar
		16	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata	Kepala Dispar
		17	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata	Kepala Dispar
		18	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minum	Kepala Dispar
		19	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata	Kepala Dispar
		20	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata	Kepala Dispar
		21	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata	Kepala Dispar
		22	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata	Kepala Dispar
		23	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi	Kepala Dispar
		24	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Kepala Dispar
		25	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	Kepala Dispar
		26	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Spa	Kepala Dispar
		27	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta	Kepala Dispar
		28	Rekomendasi Tanda Daftar Sanggar Senam	Kepala Dispar
			PERIZINAN	
VI	Pemerintahan	1	Izin Penetapan Lokasi Rumah Ibadah	Kepala DPMPSTSP

		2	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Pertimbangan Teknis Izin Lokasi Rumah Ibadah	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		2	Rekomendasi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	Asisten Pemerintahan dan Kesra
		3	Rekomendasi izin Rumah Ibadah	Bupati Lamandau
			PERIZINAN	
VII	Lingkungan Hidup	1	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala DPMPTSP
		5	Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Analisis Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	Kepala DLHK
		2	Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Kepala DLHK
		3	Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala DLHK
		4	Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit	Kepala DLHK
		5	Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	Kepala DLHK

			PERIZINAN	
VIII	Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1	Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Usaha Peternakan	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Rumah Potong Hewan	Kepala DPMPTSP
		4	Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan (SIPI)	Kepala DPMPTSP
		5	Surat Izin Pembudidayaan Ikan Perikanan (SIPBI)	Kepala DPMPTSP
		6	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Kepala DPMPTSP
		7	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Usaha Pertokoan (Bidang Perikanan)	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Toko Obat Hewan	Kepala DPMPTSP
		10	Tanda Daftar Usaha Peternakan	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Potong Hewan	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	Kepala Distanakan
		1	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	Kepala Distanakan
		2	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan	Kepala Distanakan
		3	Rekomendasi Izin Rumah Potong Hewan	Kepala Distanakan
		4	Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan (SIPI)	Kepala Distanakan
		5	Rekomendasi Surat Izin Pembudidayaan Ikan Perikanan (SIPBI)	Kepala Distanakan
		6	Rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Kepala Distanakan
		7	Rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Kepala Distanakan
		8	Rekomendasi Izin Usaha Pertokoan (Bidang Perikanan)	Kepala Distanakan
		9	Rekomendasi Izin Toko Obat Hewan	Kepala Distanakan
		10	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Peternakan	Kepala Distanakan
		11	Rekomendasi Izin Potong Hewan	Kepala Distanakan

			PERIZINAN	
IX	Perkebunan	1	Persetujuan Prinsip	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Lokasi	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	Kepala DPMPTSP
		6	Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)	Kepala DPMPTSP
		7	Surat Tanda Daftar Pengolahan(STD-P)	Kepala DPMPTSP
		8	SK Penetapan CP/CL Kelompok Tani Plasma	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Usaha Pembelian dan Penjualan TBS	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Pertimbangan Teknis Izin Lokasi	Kepala BPN, PUPR, Distanakan, DLHK
		2	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUPP)	Kepala BPN, PUPR, Distanakan, DLHK
		3	Pertimbangan TeknisIzin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	Kepala BPN, PUPR, Distanakan, DLHK
		4	Pertimbangan TeknisPengurusan Hak Guna Usaha (HGU	Kepala BPN, PUPR, Distanakan, DLHK
		5	Pertimbangan Teknis Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B)	Kepala Distanakan
		6	Pertimbangan Teknis Surat Tanda Daftar Pengolahan(STD-P)	Kepala Distanakan
		7	Pertimbangan Teknis Penetapan CP/CL Kelompok Tani Plasma	Kepala Distanakan
		1	Rekomendasi Persetujuan Prinsip	Bupati Lamandau
		2	Rekomendasi Izin Lokasi	Bupati Lamandau
		3	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Bupati Lamandau
		4	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)	Bupati Lamandau
		5	Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	Bupati Lamandau
		6	Rekomendasi Surat Tanda Daftar	Bupati Lamandau

			Budidaya (STD-B)	
		7	Rekomendasi Surat Tanda Daftar Pengolahan(STD-P)	Bupati Lamandau
		8	Rekomendasi Penetapan CP/CL Kelompok Tani Plasma	Bupati Lamandau
			PERIZINAN	
X	Minyak dan Gas	1	Izin Pangkalan Elpigi	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Pengecer Elpigi	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Pangkalan Elpigi	Bupati Lamandau
		2	Rekomendasi Izin Pengecer Elpigi	Bupati Lamandau
		3	Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas	Bupati Lamandau
		4	Rekomendasi Pengurusan Izin Usaha Ketenagalistrikan	Bupati Lamandau
		5	Rekomendasi Pengurusan Izin Operasi Dan Izin Menjual Daya Listrik	Bupati Lamandau
	Pertambangan	1	Rekomendasi Galian C	Bupati Lamandau
			PERIZINAN	
XI	Pendidikan	1	Izin Pendirian Sekolah (TK, SD dan SMP sejenis)	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Operasional Sekolah(TK, SD dan SMP sejenis)	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Operasional Lembaga Pendidikan Informal	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Kepala DPMPTSP
		8	Tanda Daftar Usaha Sanggar Seni dan Budaya)	Kepala DPMPTSP

			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah (TK, SD dan SMP sejenis)	Kepala Disdikbud
		2	Rekomendasi Izin Operasional Sekolah(TK, SD dan SMP sejenis)	Kepala Disdikbud
		3	Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	Kepala Disdikbud
		4	Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kepala Disdikbud
		5	Rekomendasi Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Kepala Disdikbud
		6	Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pendidikan Informal	Kepala Disdikbud
		7	Rekomendasi Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Kepala Disdikbud
		8	Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Sanggar Seni dan Budaya)	Kepala Disdikbud
			PERIZINAN	
XII	Pekerjaan Umum	1	Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Tinggal/Usaha/Industri/Sosial)	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Kepala DPMPTSP
		3	Izin Penyewaan Alat Berat	Kepala DPMPTSP
		4	Izin Tempat Pemakaman	Kepala DPMPTSP
		5	Izin Tempat Pembuangan Akhir dan Pelayanan Angkutan Bidang Kebersihan	Kepala DPMPTSP
		6	Izin Membangun Prasarana (IMP) Jalan dan Jembatan	Kepala DPMPTSP
		7	Izin Membangun Prasarana (IMP) Sumber Daya Air	Kepala DPMPTSP
		8	Izin Usaha Pelayanan Angkutan Di Bidang Kebersihan	Kepala DPMPTSP
		9	Izin Usaha Pengelolaan Sampah	Kepala DPMPTSP
		11	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Lokasi Shoting Film	Kepala DPMPTSP
		12	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bazar, Perlombaan, Sarasehan, Pameran, Acara Ritual dan Lainnya	Kepala DPMPTSP

		13	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Perkemahan	Kepala DPMPTSP
		14	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet)	Kepala DPMPTSP
		15	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Material Pekerjaan Proyek	Kepala DPMPTSP
		16	Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Titik Lubang Tiang Umbul-Umbul	Kepala DPMPTSP
		17	Izin Penggunaan Bangunan Dilokasi Taman dan Jalur Hijau	Kepala DPMPTSP
		18	Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman Untuk Shoting Film	Kepala DPMPTSP
		19	Izin Pemakaman Jenazah (Pada Lokasi TPU Yang Dikelola Pemerintah Daerah)	Kepala DPMPTSP
		20	Izin Mengangkut Jenazah Keluar Wilayah Kabupaten Lamandau	Kepala DPMPTSP
		21	Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman	Kepala DPMPTSP
		22	Izin Usaha Angkutan Jenazah	Kepala DPMPTSP
		23	Izin Penggunaan Tanah Makam dan Pemasangan Plaket	Kepala DPMPTSP
		24	Penerbitan Surat Izin Rumah Kost	Kepala DPMPTSP
		25	Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	Kepala DPMPTSP
		26	Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Tinggal/Usaha/Industri/Sosial)	Kepala Dinas PUPR
		2	Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (I UJK)	Kepala Dinas PUPR
		3	Rekomendasi Izin Penyewaan Alat Berat	Kepala Dinas PUPR
		4	Rekomendasi Pengukuran Lahan	Kepala Dinas PUPR
		5	Rekomendasi Izin Membangun Prasarana (IMP) Jalan dan Jembatan	Kepala Dinas PUPR
		6	Rekomendasi Izin Membangun Prasarana (IMP) Sumber Daya Air	Kepala Dinas PUPR

		6	Rekomendasi Izin Membangun Prasarana (IMP) Sumber Daya Air	Kepala Dinas PUPR
		7	Rekomendasi Izin Usaha Pelayanan Angkutan Di Bidang Kebersihan	Kepala Dinas PUPR
		8	Rekomendasi Izin Usaha Pengelolaan Sampah	Kepala Dinas PUPR
		9	Rekomendasi Izin Usaha Pemusnahan / Pemaanfaatan Sampah dan Air Kotor	Kepala Dinas PUPR
		10	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Lokasi Shoting Film	Kepala Dinas PUPR
		11	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bazar, Perlombaan, Sarasehan, Pameran, Acara Ritual dan Lainnya	Kepala Dinas PUPR
		12	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Perkemahan	Kepala Dinas PUPR
		13	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Bedeng Proyek (Direksi Keet)	Kepala Dinas PUPR
		14	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Material Pekerjaan Proyek	Kepala Dinas PUPR
		15	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau Untuk Titik Lubang Tiang Umbul-Umbul	Kepala Dinas PUPR
		16	Rekomendasi Izin Penggunaan Bangunan Dilokasi Taman dan Jalur Hijau	Kepala Dinas PUPR
		17	Rekomendasi Izin Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman Untuk Shoting Film	Kepala Dinas PUPR
		18	Rekomendasi Izin Pemakaman Jenazah (Pada Lokasi TPU Yang Dikelola Pemerintah Daerah)	Kepala Dinas PUPR
		19	Rekomendasi Izin Mengangkut Jenazah Keluar Wilayah Kabupaten Lamandau	Kepala Dinas PUPR
		20	Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman	Kepala Dinas PUPR

		21	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Jenazah	Kepala Dinas PUPR
		22	Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Makam dan Pemasangan Plaket	Kepala Dinas PUPR
		23	Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Rumah Kost	Kepala Dinas PUPR
		24	Rekomendasi Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	Kepala Dinas PUPR
		25	Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)	Kepala Dinas PUPR
		26	Rekomendasi Izin Reklame	Kepala Dinas PUPR
			PERIZINAN	
XIII	Kesbang Pol	1	Izin Penelitian	Kepala DPMPTSP
		2	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kepala DPMPTSP
			NON PERIZINAN	
		1	Rekomendasi Izin Penelitian	Kepala Kesbangpol
		2	Rekomendasi Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kepala Kesbangpol
			PERIZINAN	
XIV	Pendapatan Asli Daerah	1	Izin Reklame	Kepala DPMPTSP

Sumber: Keputusan Bupati Lamandau Nomor:188.45/301/VIII/HUK/2017

3.1.2 Analisa Isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintudirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu(DPMPTSP), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan DPMPTSP, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi DPMPTSP. Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu strategis pelayanan DPMPTSP.

A. Faktor Internal DPMPTSP

Kekuatan	Kelemahan
1. Kapasitaskelembagaanpelayanan perizinandanpenanaman modal yang semakinberkembang	1. Sumberdaya keuangan yang sangat terbatas
2. Memilikikewenanganuntukmengelola perizinan, nunPerizinandanpenanaman modal	2. Sumberdaya manusia yang professional masih terbatas
3. Adanyakemauan yang kuatdaripersoniluntukmaju	3. Sumber belajar yang terbatas
	4. Koordinasi yang kurang optimal
	5. Regulasi yang belum jelas dan tidak sesuai dgn kondisi terkini
	6. Sarana dan prasarana pelayanan Perizinan yang kurang
	7. pengembangan sistem informasi Perizinan masih belum optimal

B. Faktor Eksternal DPMPTSP

Peluang	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan terhadap pelayanan perizinan, non Perizinan dan penanaman modal yang prima, terpercaya dan transparan sangat tinggi 2. Pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagai penarik investasi daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi 3. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan 4. Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan dan penanaman modal 5. Adanya dorongan publik menjadikan SKPD pelayanan perizinan dan penanaman modal menjadi Institusi yang terpercaya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku dalam proses pemberian dan penerbitan izin 2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal 3. Kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang berlaku masih belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih:

Visi Pemerintahan Kabupaten Lamandau periode 2018-2023 adalah:

"Bergerak Cepat Membangun Kabupaten Lamandau dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius Dan Aman)"

Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, maka Misi Pemerintahan Kabupaten Lamandau adalah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, sehat dan sejahtera.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang bermoral, religius, dan aman berdasarkan nilai-nilai dan kearifan budaya lokal.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Visi dan Misi pemerintahan Kabupaten Lamandau tersebut telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lamandau 2018-2023 yang menjadi acuan penyusunan Perubahan Rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lamandau untuk periode yang sama.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Lamandau 2018-2023 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa kontribusi DPMPTSP dalam upaya pencapaian visi pemerintahan Kabupaten Lamandau 2018-2023 berada di bawah misi 3 yaitu **Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup.**

Misi ke 3	: Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan dan kelestarian lingkungan hidup
Tujuan	: meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Sasaran 2	: Menurunnya kemiskinan dan meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan
Strategi	: a. Peningkatan kualitas perencanaan dan informasi investasi
b. Peningkatan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
Kebijakan	: a. Meningkatkan fasilitas dalam bidang promosi investasi kepada investor melalui koordinasi dengan instansi terkait

- b. Mengoptimalkan pelayanan informasi investasi
- c. Meningkatkan pengetahuan/ wawasan aparatur DPMPTSP dalam bidang investasi
- d. Melakukan sosialisasi kewajiban LKPM bagi perusahaan-Perusahaan PMDN dan PMA di Kabupaten Lamandau
- e. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal

3.2. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan dokumen Renstra BKPM 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d) percepatan pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN tersebut maka tantangan **pertama** dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan *Total Factor Productivity* (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan

dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*).

Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara lain dengan kebijakan: (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia usaha; (b) perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan *right government policy*; dan (c) memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan domestik.

Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian masalah (*debottlenecking*) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketiga, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta logistik.

Ketersediaan infrastruktur saat ini masih sangat terbatas. Rata-rata rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2014 sekitar 81,5%. Di kawasan timur Indonesia rasio elektrifikasinya jauh lebih rendah dari rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Selain masih rendahnya rasio elektrifikasi, kualitas listrik (*service level*) masih buruk. Sementara itu,

pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, khususnya *smelter*, membutuhkan listrik yang sangat besar dan stabil. Untuk mendorong penanaman modal yang lebih merata, pada tahun 2015-2019 Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur tenaga listrik sebesar 35,9 GW. Selain itu, akan dibangun 172 pelabuhan baru, 65 dermaga penyeberangan baru, 15 bandara baru, 3.258 km jalur kereta, 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, serta pengembangan 14 Kawasan Industri (KI) dan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Pulau Jawa.

Untuk mencapai target tersebut, dalam lima tahun kedepan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia adalah Rp 5.519,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan Pemerintah hanya berkisar 40,14% atau sekitar Rp 2.215,6 triliun selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga terdapat selisih pendanaan sekitar Rp 3.303,8 triliun (Bappenas, 2014). Pemerintah akan melakukan kaji ulang struktur APBN antara lain dengan mengurangi subsidi BBM dan mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur. Tantangan ke depan adalah mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun non KPS (*Business to Business*). Selain itu, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang diinisiasi oleh Pemerintah Tiongkok. Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah pemanfaatan kesepakatan G-20 maupun AIIB untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Keempat, terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat mempengaruhi penanaman modal di Indonesia, yaitu:

1. Melambatnya perekonomian dunia. Skenario pesimis terus berlangsung. Pada bulan Januari 2015, IMF dalam laporannya di *World Economic Outlook* (WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia. Penurunan harga minyak yang sangat besar (55%) belum dapat mengimbangi faktor negatif antara lain melemahnya investasi dunia akibat memburuknya ekspektasi terhadap

pertumbuhan perekonomian jangka menengah di negara maju dan negara berkembang. Semua negara utama dunia terkoreksi pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Jepang, kawasan Euro, Rusia dan negara-negara eksportir minyak terkoreksi.

2. Rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era *commodities super cycle* (peningkatan permintaan komoditi dunia).
3. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan “normalisasi” moneter atau penghentian stimulus moneter (*tapering off quantitative easing*) pada akhir tahun 2014. Kebijakan tersebut akan diikuti dengan kenaikan suku bunga dunia.
4. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya pasca diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, *techno readiness* dan *financial market development*.

Kelima, Sejak awal tahun 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai tukar rupiah yang didorong oleh:

1. **Faktor Eksternal**: apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang akibat rencana kenaikan FFR (*Federal Fund Rate*) dan kebijakan *Quantitative Easing* ECB (*European Central Bank*) dan BOJ (*Bank of Japan*) yang diikuti oleh sejumlah negara.
2. **Faktor Internal**: defisit transaksi berjalan (*current account*). Terdapat risiko *missmatch* utang luar negeri swasta dan hanya 13,6% melakukan lindung tunai (*forex hedging*).

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking).

2. Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan ini disusun dalam rangka mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, meningkatkan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, meningkatkan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

3.4 Telahaan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan kriteria dibawah ini.

Kriteria untuk menetapkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Serasi dan mengklasifikasikan Visi, Misi dan nilai-nilai organisasi;
2. Menjangkau hasil penilaian lingkungan internal dan eksternal dan yang diprioritaskan, serta merespon isu-isu strategis;
3. Dapat mengatasi kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dengan yang diinginkan;
4. Menggambarkan hasil program/sub program yang diinginkannya;
5. Menggambarkan arah yang jelas dari organisasi, program dan sub program, tetapi belum menetapkan ukuran-ukuran spesifik dan strategis.

Tujuan yang mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Fasilitasi layanan terhadap calon investor dalam negeri atau luar negeri (PMA/PMDN) untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah melalui PTSP;
2. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi dalam maupun luar negeri;
3. Mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing usaha kecil, menengah dan koperasi;
4. Meningkatkan kegiatan promosi dan kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat; dan
6. Meningkatkan Profesionalisme bagi aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan penanaman modal agar bersinergi dengan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan potensi dan permasalahan penanaman modal di Indonesia khususnya Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Lamandau, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lamandau akan ***Meningkatkan kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*** sehingga ***nilai investasi PMDN dan PMA meningkat*** dengan memperhatikan beberapa hal yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan OPD dalam 5 (lima) tahun kedepan :

2018-2023 Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan informasi investasi.
4. Peningkatan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal.
5. Percepatan pelayanan pengaduan.
6. Peningkatan pelayanan perizinan terpadu.

Hal-hal tersebut di atas menjadi masukan didalam menentukan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lamandau 2018-2023.

3.5 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian Lingkungan hidup Strategis

3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian perizinan sehingga pembangunan di Kabupaten Lamandau selaras dengan struktur dan pola ruang. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten lamandau tahun 2013-2033 menjadi pedoman dalam pemberian perizinan yang menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Dalam hal pemberian perizinan sesuai dengan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

satu Pintu harus mengacu/ mengikuti ketentuan perizinan yang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam pasal 66 Peraturan Daerah ini. Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Lamandau, terdiri atas :Izin prinsip;Izin lokasi;Izin perubahan penggunaan tanah; danIzin mendirikan bangunan sesuai pada pasal 67.

Dengan mengikuti ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diharapkan dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program.

Terkait dengan isu lingkungan, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal akan berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamandau.

3.6 Penentu Isu Strategis:

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPMPPTSP ditentukan oleh isu-isu strategis:

1. Kinerja aparatur
 - a. SDM masih ada yang belum memenuhi kompetensi

- b. Sarana dan prasarana dan fasilitas pendukung pelayanan perizinan ada yang belum terpenuhi menurut kebutuhan Bidang-bidang.
 - c. Dukungan Anggaran yang terbatas.
2. Kualitas pelayanan perizinan
- a. Belum maksimal/optimalnya sistem informasi Perizinan yang transparan dan mudah diakses untuk digunakan Oleh masyarakat.
 - b. Belum optimalnya tugas tim teknis dan mekanisme proses persetujuan perizinan.
 - c. Masih terdapatnya regulasi yang menjadi acuan Perizinan yang belum sesuai dengan kondisi terkini (mutakhir)
 - d. Belum efektifnya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk pengendalian pelaksanaan Perizinan. Hal ini terlihat dari adanya perubahan perubahan peruntukan dari izin yang diberikan.
 - e. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD pemberi pelayanan.
 - f. Peningkatan status kelembagaan belum di ikuti dengan Peningkatan Anggaran.
3. Pemahaman masyarakat/perusahaan tentang proses perizinan
- a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang perlunya/ manfaat mengurus Perizinan.
 - b. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan
 - c. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan.